

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2013-2022, peneliti menyimpulkan:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan, dimana hal itu dilatarbelakangi oleh IPM yang cenderung meningkat secara berkala dan selaras dengan peningkatan ketimpangan pendapatan dalam periode 10 tahun terakhir. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa wilayah yang termasuk ke dalam kategori tinggi untuk pembangunan manusianya, sebab merupakan wilayah dengan daya tarik kegiatan pariwisata dan juga pendidikan. Hal yang mendorong buruknya kondisi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota dikarenakan persebaran pembangunan manusianya yang tidak merata dan hanya terfokus pada wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi yang menyebabkan IPM terus meningkat yang dibarengi juga dengan melebarnya jurang pendapatan antar masyarakatnya.
2. Adanya pengaruh yang signifikan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan, dimana hal itu dilatarbelakangi oleh proses pergerakan dari sektor pertanian ke sektor yang lebih modern, salah satunya sektor industri yang memiliki kontribusi cukup besar pada perekonomian Provinsi Jawa Timur dan berhasil memicu serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakatnya. Oleh sebab itu, terdapat masa dimana ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan, maka ketimpangan juga turut meningkat karena penciptaan lapangan kerja yang kesempatannya belum begitu luas untuk di akses oleh masyarakat yang berada pada sektor pertanian sebelumnya.
3. Kondisi PDRB Perkapita yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, dilatarbelakangi oleh kondisi tiap

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta sektor unggulannya masing-masing dimana hanya ada sedikit industri yang besar dan dapat berkontribusi dalam perekonomian. Oleh karena itu, PDRB Perkapita tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terkait Ketimpangan Pendapatan yang terjadi.

4. Kondisi Kemiskinan dengan diwakili oleh jumlah penduduk miskin yang tidak berpengaruh secara signifikan pada Ketimpangan Pendapatan, dilatarbelakangi oleh fakta bahwa penurunan jumlah penduduk miskin dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang termasuk ke dalam kategori tersebut. Namun turunnya jumlah penduduk miskin hanya menjadi salah satu faktor dan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Terdapat pengaruh simultan antara IPM, TPAK, PDRB Perkapita dan Kemiskinan dengan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti jika IPM, TPAK, PDRB Perkapita dan Kemiskinan secara bersama-sama akan mempengaruhi kondisi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti tentang Ketimpangan Pendapatan diharapkan menggunakan kondisi dan data yang lebih terkini.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan lebih mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel independen lain yang tertuju sebagai variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

V.2.2 Saran Praktis

1. Bagi wilayah dengan jumlah Kabupaten/Kota yang banyak seperti Provinsi Jawa Timur, pemerintah perlu melakukan pemerataan dalam kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup untuk tujuan meningkatkan IPM. Keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan di

daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi perlu ditingkatkan misalnya dengan membuat pos kesehatan untuk keperluan pertolongan pertama. Selanjutnya ketersediaan fasilitas pendidikan seharusnya dilakukan pemerataan yang dapat mencapai wilayah terpencil untuk menciptakan peluang dan keterampilan masyarakat.

2. Proses perpindahan dari sektor pertanian menuju sektor modern memang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini karena persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja relatif berkurang karena terbatasnya kesempatan kerja pada sektor modern dengan kualifikasi tinggi yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dengan kualifikasi yang lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Jadi, jurang antara penduduk berpendapatan tinggi dan rendah dapat menyusut seiring dengan perkembangan sektor modern.